

## BAB II

### DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA TERHADAP KONFLIK THAILAND SELATAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai dinamika politik Malaysia selaku penengah dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan. Selain itu bab ini juga akan membahas mengenai dinamika politik luar negeri Malaysia dan politik luar negeri Malaysia terhadap konflik di Thailand Selatan.

#### A. Dinamika Politik Malaysia

Gambar 2.1. Peta Malaysia



Sumber: *Malaysia Political Map* dalam <http://www.emapsworld.com/malaysia-political-map.html>.

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang beribukota di Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas 329.847 km persegi. Jumlah penduduk negara ini sekitar 30 juta jiwa, yang terdiri dari 3 bangsa utama yakni Melayu, Cina dan India<sup>1</sup>. Penduduk asli Melayu membentuk kelompok etnis tunggal terbesar (50 persen), diikuti oleh etnis Cina (24 persen) dan India (7 persen). Ada juga

<sup>1</sup><https://www.statistics.gov.my/> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 14.10 WIB

sejumlah kecil masyarakat adat yakni Orang Asli yang tinggal di pedalaman Semenanjung Malaya. Sabah dan Sarawak di Kalimantan dihuni terutama oleh orang-orang Dayak dan masyarakat non-Melayu.

Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer. Kepala negara adalah Yang di Pertuan Agung. Dia dipilih oleh (dan dari kalangan) para raja (penguasa) dari sembilan negara bagian asli Melayu untuk menjabat selama 5 tahun. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri, yang ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agung. Legislatif terdiri atas dua rumah, Dewan Negara (Senat) dan Dewan Rakyat (DPR). Perdana menteri harus menjadi anggota DPR dan harus mendapat dukungan dari institusi itu untuk tetap berkuasa. Perdana menteri dibantu oleh kabinet menteri. Sejak kemerdekaan, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menjadi kekuatan politik yang dominan. Perdana menteri selalu orang Melayu dan merupakan ketua Partai UMNO.

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Pada tahun 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia, termasuk dengan Federasi Malaya. Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dari Indonesia. Konflik dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno melalui Dwikora karena ketidaksesuaian dengan laporan

Sekretaris Jenderal PBB menyangkut pelanggaran Manila *Accord* dalam pembentukan Malaysia<sup>2</sup>.

Dalam perjalanan federasi ini kemudian diikuti dengan keluarnya Singapura pada 1965 karena kembali adanya ketidak sesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian antar-ras di dalam Insiden 13 Mei 1969<sup>3</sup>. Filipina juga membuat pengakuan aktif terhadap Sabah dengan penyelesaian damai pada periode itu berdasarkan penyerahan sebagian wilayah Kesultanan Brunei, yakni bagian Timur-Utara kepada Kesultanan Sulu pada 1704. Pengakuan atas wilayah ini masih dilanjutkan hingga saat ini oleh pihak Filipina<sup>4</sup>.

Malaysia memiliki kultur dan dinamika politik yang unik dan berbeda dengan politik domestik negara-negara lain di kawasan. Struktur sosial masyarakat yang plural banyak mempengaruhi perkembangan demokrasi di Malaysia. Posisi strategis Malaysia tidak terlepas dari etnisitas dalam politik Malaysia yang didominasi oleh etnis Melayu. Dimana adanya *interplay* antara konsepsi keamanan etnis Melayu dan keamanan nasional. Hal ini berawal ketika tahun 1930, Partai Komunis Malaysia didominasi oleh etnis Cina yang membuat kerusuhan ketika pengambilan keputusan politik luar negeri. Sehingga hal ini dirasa mengganggu etnis Melayu yang kemudian mengambil

---

<sup>2</sup>Liputan6. 2014. *Cerita Dibalik Konfrontasi Indonesia-Malaysia*.

<http://news.liputan6.com/read/824350/cerita-di-balik-konfrontasi-indonesia-malaysia> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 14.30 WIB

<sup>3</sup>Mohamad, Ardyan. 2012, *Kemerdekaan Singapura Hasil Bentrok Ras Dengan Malaysia*.

<http://www.merdeka.com/dunia/kemerdekaan-singapura-hasil-bentrok-ras-dengan-malaysia.html> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 15.10 WIB

<sup>4</sup>Muhaimin. 2016. *Presiden Terpilih Filipina Ributkan Klaim Sabah Dengan Malaysia*.

<http://international.sindonews.com/read/1113374/40/presiden-terpilih-filipina-ributkan-klaim-sabah-dengan-malaysia-1464839409> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 15.50

alih keamanan Malaysia dengan tujuan membendung komunis Cina tersebut. Hal itu pula didukung oleh adanya konstitusi mengenai hak istimewa untuk penduduk etnis Melayu dalam berbagai sektor.<sup>5</sup> Konstitusi tersebut sengaja diciptakan sebagai perlindungan serta memelihara kehormatan penduduk pribumi di hadapan penduduk non-pribumi. Agama Islam juga menjadi posisi strategis dalam pembentukan negara Malaysia dengan adanya kewajiban bagi sembilan wilayah di kesultanan Malaysia untuk memeluk agama Islam bagi warga suku Melayu. Bahasa Melayu pun turut mendukung untuk memperkuat konsepsi keamanan nasional dengan penggunaannya dalam komunikasi formal maupun informal di negara tersebut.

Setelah Insiden 13 Mei 1969, Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial yaitu upaya kenaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra pribumi, yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya, diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

Kebijakan politik Malaysia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir dinilai cenderung otoriter. Hal ini didasari karena munculnya kesadaran untuk memperbaiki politik baik domestik maupun internasional negara itu sendiri. Pembangunan ekonomi pun gencar dilaksanakan dengan

---

<sup>5</sup> Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 122-124.

munculnya kebijakan-kebijakan baru yang dianggap menjadi tonggak kesuksesan perekonomian Malaysia saat ini. Adanya ambisi tersebut juga diiringi dengan kesadaran akan menghormati suku asli penduduk Malaysia yakni Melayu. Dengan adanya dominasi warga Melayu yang menjadi aparat pemerintahan di negara Malaysia, dapat membuktikan pula bahwa Malaysia sudah sangat kuat dalam posisi internalnya sendiri<sup>6</sup>.

Peran Malaysia di ASEAN dalam konflik regional utamanya adalah mengenai isu keamanan. Politik luar negeri Malaysia berfokus pada bagaimana pencapaiannya pada stabilitas politik dalam keamanan domestik dan mengendalikan ancaman regional maupun global. Semenjak ASEAN didirikan, politik luar negeri Malaysia mulai memfokuskan diri pada masalah regional dan mengalihkan kepentingan negara Barat. Reorientasi politik luar negeri Malaysia juga dinilai berdasarkan kemampuan negeri Jiran tersebut dalam menghadapi ancaman internal. Malaysia kemudian melakukan kerjasama kolektif ASEAN dengan menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* untuk menghindari kekerasan dan mengedepankan konsultasi dalam mencari solusi atas konflik antar negara anggota ASEAN.<sup>7</sup>

## **B. Politik Luar Negeri Malaysia**

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai tujuan, rencana dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam usaha untuk berhubungan

---

<sup>6</sup>Elistifani, Trisca Mia. 2014. *Dinamika Perkembangan Politik Negara Malaysia*. [http://triscamiaa-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-101385-MBP%20Asia%20Tenggara-Dinamika%20Perkembangan%20Politik%20Negara%20Malaysia.html](http://triscamiaa-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-101385-MBP%20Asia%20Tenggara-Dinamika%20Perkembangan%20Politik%20Negara%20Malaysia.html). Diakses pada tanggal 09 April 2017 pukul 12.58 WIB.

<sup>7</sup> Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 120.

dengan negara yang lain dalam pengertian yang terbatas, kebijakan luar negeri hanya mementingkan aspek tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mempengaruhi kondisi-kondisi yang berada di luar bidang kuasanya. Untuk menjaga kepentingan, keamanan dan keselamatan negara, hubungan di antara sebuah negara dengan negara yang lain adalah perlu dan penting. Hal ini demikian karena kebanyakan negara bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, teknologi dan keamanan. Negara maju harus mengadakan hubungan dengan negara berkembang khususnya dalam bidang perdagangan.

Menurut Mohtar Mas'ood politik luar negeri merupakan suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan dengan situasi atau aktor yang ada diluar batas wilayah negara<sup>8</sup>. Dengan demikian, politik luar negeri Malaysia adalah tindakan yang dilakukan oleh Malaysia berkenaan dengan situasi atau aktor diluar batas wilayahnya. Gaya dan pendekatan dalam mengemukakan politik luar negeri Malaysia mungkin berbeda mengikut kepribadian setiap Perdana Menteri Malaysia.

### **1. Tujuan-tujuan Utama Politik Luar Negeri Malaysia**

Tujuan dasar dan utama Politik Luar negeri Malaysia adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di arena internasional sekaligus di pentas dunia<sup>9</sup>. Menurut pernyataan mantan Menteri Luar Negeri, Dato 'Seri Syed Hamid Albar, antara sasaran paling utama

---

<sup>8</sup> Mas'ood, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisi*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Hal. 87

<sup>9</sup>Pmo.gov.my. *Dasar Luar Negara*,

[http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/DASAR\\_LUAR\\_NEGARA.pdf](http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/DASAR_LUAR_NEGARA.pdf). Diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 18.00 WIB.

kebijakan luar negara Malaysia adalah menjaga, mempertahankan dan memajukan kepentingan-kepentingan Malaysia di tingkat global. Selain itu, kebijakan ini turut menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keamanan Malaysia berikutnya mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan suatu wilayah melalui kebijakan tidak campur tangan dalam urusan dan masalah internal negara lain. Tambahan lagi, tujuan berikutnya adalah untuk menangani perkembangan dan tantangan politik, ekonomi, keamanan dan sosial di pentas dunia. Kebijakan ini juga dapat memupuk hubungan baik serta dapat mempererat kerjasama dengan negar-negara lain. Selain itu, pendirian serta kepentingan negara-negara yang sedang berkembang dapat dipertahankan di tingkat internasional.

## **2. Prinsip Dasar Politik Luar Negeri Malaysia**

Salah satu prinsip Malaysia adalah menyelesaikan masalah melalui negosiasi/perundingan<sup>10</sup>. Malaysia mengamalkan prinsip pendekatan terbaik-baik dengan negara-negara lain di samping siap membuka hubungan diplomatik dengan negara manapun yang kooperatif dengan negara. Malaysia memilih untuk menyelesaikan masalah dengan negara lain melalui konsultasi atau meja bulat dan menolak sekeras kerasnya perdebatan apalagi secara kekerasan dan paksaan. Seterusnya, Malaysia mengamalkan prinsip hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Malaysia selalu memperjuangkan hak untuk setiap negara sehingga

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

menyelesaikan masalah internalnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Selain itu, Malaysia yakin bahwa setiap orang di setiap negara tahu apa yang terbaik untuk negara mereka dan lebih memahami apa yang diperlukan. Jadi, Malaysia mendukung secara tidak langsung perjuangan-perjuangan Organisasi Pembebasan Palestina dan pejuang-pejuang Mujahidin Afghanistan serta mendukung adanya perdamaian di Thailand Selatan.

## **2. Politik Luar Negeri Malaysia Pada Era Tunku Abdul Rahman Sampai Era Dato Seri Najib Tun Razak.**

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh penyelidik-penyelidik di negara Malaysia menunjukkan bahawa politik luar negeri Malaysia sejak 1957 memperlihatkan perkembangan yang stabil dan mempunyai ciri perubahan yang mencolok mengikut perubahan dalam pengawasan politik Malaysia. Politik luar negeri Malaysiatelah dibentuk sejak kemerdekaan Malaysiadan telah melalui enam tahap oleh enam pemimpin yang berbeda yakni :

### **a. Masa Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman (1957-1970)<sup>11</sup>.**

Pada masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Politik luar negeri Malaysia berada di tahap penggagasan dan pengembangan, di mana politik luar negeri Malaysia didorong ke arah kelangsungan hidup negara yang baru merdeka. Politik luar negeri Malaysia pada masa ini bersifat anti-komunis dan pro-Barat dengan hubungan yang rapat

---

<sup>11</sup>Samad, Razali. *Dasar Luar Era Tunku Abdul Rahman*.  
<https://www.scribd.com/doc/19011858/Dasar-Luar-Era-Tunku-Abdul-Rahman>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2016 Pukul 20.47 WIB.

dengan negara-negara persemakmuran. Pendekatan ini juga bersumberkan pengaruh kepribadian Tunku yang begitu pro-Barat dan anti-komunis, selain situasi dan kondisi politik domestik yang kurang stabil ketika itu. Malaysia juga menentang kuat sistem Apartheid. Pendirian Malaysia tentang kerjasama kawasan Asia Tenggara juga mulai terlihat dengan kemunculan ASA (1960), MAPHILINDO (1963) dan ASEAN (1967).

b. Masa Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein (1970-1975)<sup>12</sup>.

Pada zaman Tun Abdul Razak Hussein, politik luar negeri Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa memandang ideologi dan politik. Era pemerintahan Perdana Menteri Kedua Malaysia dari 1970–1976 di bawah kepemimpinan Tun Abdul Razak memperlihatkan upaya mendalam Tun Abdul Razak mengendalikan politik luar negeri Malaysia mengikut arus perubahan. Malaysia pada masa ini bergabung menjadi anggota organisasi kerjasama Islam (OKI) dan mulai memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah “Negara Islam”. Tunku Abdul Razak telah berusaha membuat politik luar negeri Malaysia netral dengan menjalin hubungan diplomatik dengan hampir semua negara tanpa memandang ideologi.

---

<sup>12</sup>Juliana Mukhtarudin, Mas dan Rusdi Omar. Januari 2014. *Political Managements and Policies in Malaysia, Dasar Luar Malaysia Era Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak: Keutamaan Dalam Aspek Hubungan Dua*

Hala. [https://www.researchgate.net/publication/290810607\\_Political\\_Managements\\_and\\_Policies\\_in\\_Malaysia\\_Dasar\\_Luar\\_Malaysia\\_Era\\_Dato%27\\_Seri\\_Mohd\\_Najib\\_Tun\\_Razak\\_Keutamaan\\_Dalam\\_Aspek\\_Hubungan\\_Dua\\_Hala](https://www.researchgate.net/publication/290810607_Political_Managements_and_Policies_in_Malaysia_Dasar_Luar_Malaysia_Era_Dato%27_Seri_Mohd_Najib_Tun_Razak_Keutamaan_Dalam_Aspek_Hubungan_Dua_Hala). Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 20.08 WIB.

Pada masa ini Malaysia berusaha menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara baru secara besar-besaran untuk meningkatkan kepentingan negara-negara non-blok kepada Malaysia. Malaysia sebagai negara non-blok berusaha untuk netral demi terwujudnya kebebasan dan harmoni antar negara. Malaysia juga mulai menjauhkan diri dari Amerika dan sekutunya, menekankan semangat kesatuan di kawasan Asia Tenggara dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara komunis. Tunku Abdul Razak juga telah mengadakan penyesuaian dalam aspek politik, ekonomi, dan kebijakan pertahanan bagi memenuhi tuntutan strategi negara.

c. Masa Perdana Menteri Tun Hussein Onn (1975-1981)<sup>13</sup>.

Pada zaman kepemimpinan Tun Hussein Onn, penekanan politik luar negeri Malaysia adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Pada masa ini ASEAN menjadi dasar dalam politik luar negeri Malaysia yang disebabkan oleh kejatuhan Saigon (Ho Chi Minh) pada tahun 1975, penarikan Tentara AS dari Asia Tenggara dan invasi Vietnam ke Kamboja. Sidang konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama diadakan dan Malaysia menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Bali pada tahun 1976. Penekanan yang lebih tegas turut dibuat atas kebebasan, non-blok dan kedudukan yang sama dengan negara dunia I. Dalam masa ini, Tun Hussein Onn lebih banyak mengekalkan dan meneruskan kebijakan yang telah dibuat oleh

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

pemimpin sebelumnya. Politik luar negeri Malaysia dalam masa ini menunjukkan era pengukuhan, di mana Malaysia tidak memihak kepada negara manapun. Hal ini bertepatan dengan lingkungan global ketika itu yang sedang bergerak ke arah peredaman ketegangan antar negara-negara yang sedang berkonflik.

d. Masa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohammad (1981-2003)<sup>14</sup>.

Perubahan yang lebih ketara terjadi ketika Tun Dr. Mahathir Mohammad mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri yang keempat pada tahun 1981. Pendirian politik luar negeri Malaysia lebih banyak berorientasikan ekonomi daripada sebelumnya, ditambah dengan pembelaan yang kuat dan semangat kebangsaan untuk hak, kepentingan dan aspirasi negara yang sedang berkembang serta dukungan dari Kerjasama Selatan-selatan. Sebelum ini, kebijakan politik luarnegeri Malaysia menjadikan Barat sebagai role-model, tetapi dalam era Tun Mahathir, Tun Mahathir membuat perubahan yang drastis dengan menjadikan Timur sebagai role-model. Ini merupakan satu pembaruan yang sangat nyata dalam pemerintahan Malaysia dan menarik perhatian dunia khususnya dunia Barat. Kepimpinan Tun Dr. Mahathir berusaha menunjukkan berbagai inisiatif baru, contohnya:

- 1) Berbagai Inisiatif Baru yang Diusahakan yaitu:
  - a) Antartika sebagai warisan bersama dunia.
  - b) Kebijakan Pandangan ke Timur (LEP).

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

- c) Berjuang untuk negara membangun dalam isu utama seperti alam sekitar, hak asasi manusia dan demokrasi.
- d) Dengan kemunculan globalisasi, mengenal pasti kesan baik dan buruk globalisasi terhadap negara yang sedang berkembang.
- e) Pendekatan yang proaktif dan bersungguh-sungguh dalam isu Apartheid dan Palestin.
- f) Perpaduan Islam – Mengetuai dan menjadi tuan rumah Sidang konferensi tingkat tinggi OKI ke-10, tuan rumah Ekspo OKI Pertama serta membentuk D-8.
- g) Keamanan dan keselamatan antara negara – Malaysia menjadi anggota UNSC, peranan sebagai pengaman di beberapa negara seperti Kamboja, Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Namibia dan Timor Leste. Malaysia turut aktif menentang sikap pilih kasih, berat sebelah dan tindakan pintas di luar lingkungan PBB.
- h) Terorisme – Malaysia menerapkan kerjasama antarabangsa di kawasan Asia Tenggara yang kukuh untuk memberantas terorisme, menentang kuat penyalahan agama atau kaum, menyarankan berbagai aspek pendekatan dalam memberantas terorisme termasuk mengenal pasti dan menghapus penyebabnya, menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri OKI berkaitan dengan terorisme pada tahun 2002, menubuhkan SEARCCT yang

memberikan tumpuan utama pada latihan dan pembangunan kapasitas.

2) Membuka Sempadan Baru yaitu:

a) Mengadakan hubungan bilateral secara aktif dengan negara Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur, terutama dalam perdagangan, investasi dan pemindahan teknologi dengan semangat Kerjasama Selatan-Selatan. Termasuk juga membuka Perwakilan Diplomatik dan lanjutan kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) di negara ini.

3) Berorientasikan Ekonomi yaitu:

a) Kerjasama Ekonomi Asia Timur (dari EAEG ke EAEC ke ASEAN +3). Kerjasama Pembangunan kawasan – Konsep Segi Tiga Pertumbuhan, seperti, IMTGT, IMSGT, BIMP-EAGA.

b) Kelompok G-15 (G15) – pelaksanaannya dicetuskan oleh Malaysia.

c) Diplomasi Ekonomi – investasi ke luar negeri dengan prinsip memakmurkan jiran, Kerjasama Selatan-Selatan, MIGHT, Dialog Antar bangsa Langkawi (LID), Dialog Antar bangsa Afrika Selatan (SAID).

e. Masa Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Badawi (2003-2009)<sup>15</sup>.

Politik luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Datuk Seri Abdullah Badawi, Abdullah Badawi menekankan hubungan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

perdagangan dengan negara Cina, membuka lembaran baru dalam hubungan antara Malaysia dengan Singapura di samping meneruskan kebijakan-kebijakan pemimpin terdahulu. politik luar negeri Malaysia di bawah kepimpinan YAB Tun Abdullah Ahmad Badawi bersifat dinamis melalui proses evolusi. Abdullah Badawi meneruskan kesinambungan politik luar negeri Malaysia era Perdana Menteri sebelumnya di samping memperhalus dan mengkonsolidasi politik luar negeri sebelumnya.

f. Masa Perdana Menteri Mohd Najib Tun Razak (2009-Sekarang)

Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak telah menjadi Perdana Menteri Malaysia Ke-6 pada 3 April 2009 menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam era pemerintahannya sebagai Perdana Menteri, Najib Tun Razak telah bergerak ke depan dengan menekankan kepada kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan dinamis berbanding era Tun Abdullah.

Najib Tun Razak meneruskan kebijakan politik luar negeri yang kuat yang membantu mewujudkan ekonomi yang solid, dinamis dan cepat membaik. Penekanan diberikan dalam kerjasama kawasan, terutama dengan ASEAN, OKI, GNB dan sebagainya. Di samping itu, Najib Tun Razak juga menekankan kepentingan dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara yang merupakan negara '*trading partner*' dengan Malaysia, terutama

dalam bidang ekonomi, seperti Cina, Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan sebagainya<sup>16</sup>.

Perkembangan kebijakan politik luar negeri Malaysia di bawah kepemimpinan perdana menteri yang silih berganti ini menunjukkan reaksi pragmatis terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi pada masa tersebut. Untuk terus relevan dengan keperluan negara, politik luar negeri tidak boleh statis. Walaupun perubahan dalam keutamaan menjadi ciri dasar bagi kebijakan luar negeri Malaysia, namun kesinambungan juga jelas terlihat. Perubahan dan kesinambungan ini memperlihatkan tahap keyakinan dan kematangan negara Malaysia yang lebih tinggi dalam mengendalikan hubungan luar negerinya. Malah, kepemimpinan Malaysia turut diakui dalam berbagai isu yang menarik minat negara yang sedang berkembang.

### **C. Politik Luar Negeri Malaysia Terhadap Konflik Thailand Selatan**

Malaysia sebagai salah satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan daerah konflik Thailand Selatan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi konflik di Thailand Selatan. Hal ini didasarkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Adanya kesamaan identitas seperti kesamaan etnis dan budaya yaitu penduduk Thailand Selatan mayoritas beretnis Melayu dan memiliki kedekatan dengan mayoritas penduduk Malaysia yang juga beretnis Melayu dan berbudaya melayu yang berlafaskan Islam. Dari segi agama

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

baik penduduk Thailand Selatan maupun penduduk Malaysia sama-sama mayoritas beragama Islam, baik penduduk Thailand Selatan maupun penduduk Malaysia rata-rata merupakan pemeluk Islam yang taat dalam kesehariannya. Dari segi bahasa, bahasa yang digunakan oleh penduduk Thailand Selatan dan Malaysia adalah bahasa Melayu. Selain itu dari segi sejarah antara penduduk Thailand Selatan dengan penduduk mayoritas Malaysia memiliki keterkaitan dimana pada zaman dahulu wilayah Thailand Selatan dan wilayah semenanjung Malaysia merupakan satu kesatuan dalam naungan kerajaan Langkasuka maupun kesultanan Pattani yang dipimpin oleh etnis Melayu. Adanya beberapa kesamaan dan keterkaitan inilah yang membuat Malaysia mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan yang bertujuan agar saudaranya yang ada di Thailand Selatan bisa mendapatkan perdamaian.

2. Adanya respon positif dari masyarakat Thailand Selatan atas keterlibatan Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan. Mayoritas penduduk di Thailand Selatan menginginkan peran Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan karena mereka beranggapan bahwa Malaysia akan mampu untuk menyelesaikan konflik yang ada dan membantu masyarakat Thailand Selatan keluar dari konflik<sup>17</sup>.
3. Kedekatan geografis antara Thailand Selatan dan Malaysia, hal ini dikarenakan karena Thailand Selatan dan Malaysia berbatasan secara

---

<sup>17</sup>Indonesian.irib.ir. 2014. *Malaysia dan Upaya Memediasi Konflik di Thailand Selatan*. <http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/84439-malaysia-dan-upaya-memediasi-konflik-di-thailand-selatan>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 21.21 WIB.

langsung yang hanya dibatasi oleh sungai dan daratan. Akibat kedekatan geografis inilah Malaysia sering kedatangan pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Thailand Selatan dan tak jarang dari mereka datang secara ilegal. Akibat dari kedekatan geografis ini juga para separatis Thailand Selatan tak jarang memasuki wilayah Malaysia untuk menghindari pengejaran dari militer Thailand yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan gangguan keamanan bagi Malaysia<sup>18</sup>.

4. Adanya komitmen dari Malaysia sebagai negara anggota ASEAN untuk menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara anggota ASEAN Malaysia menginginkan adanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara demi terciptanya stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu Malaysia selalu mengedepankan *soft* diplomasi dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan dan menentang adanya kekerasan/peperangan dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan<sup>19</sup>.
5. Adanya komitmen dari Malaysia sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu umat Islam yang dilanda konflik. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas dari penduduk Thailand Selatan adalah pemeluk agama Islam. Muslim yang tinggal di Thailand Selatan mendapatkan diskriminasi dari pemerintah Thailand baik dari segi agama,

---

<sup>18</sup>Ww1.utusan.com. 2005. *Punca Muslim Selatan Thai Lari ke Malaysia*. [http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2005&dt=0904&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_01.htm](http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2005&dt=0904&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm). Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 21.16 WIB.

<sup>19</sup>Riaupos. *Perjuangan Muslim Pattani di Thailand Selatan*. <http://riaupos.co/1766-opini-perjuangan-muslim-pattani-di-thailand-selatan.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 21.28 WIB.

bahasa, budaya maupun politik. Hal inilah yang membuat Malaysia sebagai negara anggota OKI untuk terjun untuk mengupayakan perdamaian di Thailand Selatan<sup>20</sup>.

Malaysia berperan aktif dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan dimulai Pada tahun 1998 ketika Tun Mahathir Muhammad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia<sup>21</sup>. Dimana pada masa itu pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia melakukan diplomasi untuk mendapatkan jalan yang terbaik untuk perdamaian di Thailand Selatan dan untuk beberapa tahun Thailand Selatan menikmati fase damai<sup>22</sup>. Pada tahun 2005 Malaysia kembali terlibat dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan yaitu ketika konflik kembali memanas di Thailand Selatan. Pada masa itu, Dr. Tun Mahathir Muhammad bertemu dengan beberapa perwakilan dari separatis Thailand Selatan di Langkawi untuk membicarakan upaya perdamaian di Thailand Selatan. Pada bulan berikutnya yaitu bulan oktober 2015 mantan perdana menteri Thailand yaitu Anand Panyarachun bertemu dengan Dr. Tun Mahathir Muhammad untuk membicarakan mengenai ide, pandangan dan perspektif Malaysia mengenai konflik Thailand yang bertujuan untuk

---

<sup>20</sup>Pmr.penerangan.gov.my. *Pengenalan Dasar Luar Malaysia*.

<http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/antara/7942-pengenalan-dasar-luar-malaysia.html>.

Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 Pukul 20.58 WIB.

<sup>21</sup>Walker, P. Denis. 2005. *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Sothern Thailand (Pattani) 1945-2005*, University Kebangsaan Malaysia Islamyat (27) 5. Hal. 101

<sup>22</sup> Chalk, Peter. 2008. *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict's Evolving Dynamic*, RAND: National Research Institute

mendapatkan metode terbaik untuk menyelesaikan konflik Thailand Selatan.

Malaysia sebagai negara anggota OKI ikut mendukung peran OKI dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan serta terlibat proses perdamaian yang dilakukan oleh terhadap konflik Thailand Selatan. Hal ini bisa dilihat dari ikut berperannya Malaysia dalam setiap proses dialog maupun mediasi yang dilakukan OKI dalam proses perdamaian di Thailand Selatan. Pada bulan Juni tahun 2009 OKI melibatkan Malaysia secara langsung dalam realisasi proses damai, hal ini ditandai dengan adanya kunjungan dari perkawilan Thailand yaitu Abhisit Vejjajiva mengunjungi perdana menteri Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan<sup>23</sup>.

Pada pertemuan lainnya Malaysia ikut aktif dalam upaya proses penyelesaian konflik di Thailand seperti pada tahun 2009 dimana menteri luar negeri Malaysia bertemu dengan menteri luar negeri Thailand untuk membahas strategi pembangunan daerah perbatasan yaitu daerah antara Thailand Selatan dengan Malaysia Utara yang berbatasan langsung dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan

---

<sup>23</sup> Berita Sore. 09 Juni 2009. *Malaysia-Thailand Kerjasama Tangani Thai Selatan*. <http://beritasore.com/2009/06-09-malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 10.34 WIB.

melalui sidang Komite Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Bersama (JDS)<sup>24</sup>.

Pada tahun 2013 sampai 2016 Malaysia sebagai negara terdekat dari Thailand aktif berperan menjadi fasilitator dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan. Beberapa dialog dan perundingan diadakan untuk terciptanya perdamaian di Thailand Selatan yang juga akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Southern Border Area News, “*Malaysia Cooperates with Thailand on South Issues*”, [http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news\\_id=110030](http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=110030). Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 10.42 WIB.

<sup>25</sup> Bharian.com. 2016. *Malaysia Sedia Bantu Proses Damai Selatan Thai – Najib*. <http://www.bharian.com.my/node/191182>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 21.53 WIB.